

**JURNAL  
TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI)**

**PENENTUAN PRIORITAS  
PENANGANAN INFRASTRUKTUR  
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN  
BERDASARKAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DI KELURAHAN KALIPANG KECAMATAN SUTOJAYAN  
KABUPATEN BLITAR**

**Disusun Oleh :  
Charlos Yosep Vinsen Robaka  
(13.24.053)**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
MALANG  
2019**

**DETERMINATION OF PRIORITY HANDLING  
SLUM INFRASTRUCTURE  
URBAN BASED  
COMMUNITY PARTICIPATION  
In the village of Kalipang Sutojayan District Blitar**

**PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN  
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KUMUH  
PERKOTAAN BERDASARKAN BENTUK  
PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar**

**Oleh :**

**Charlos Yosep Vinsen Robaka, Ibnu Sasongko, Annisaa Hamidah I.**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Teknologi Nasional Malang  
Jl. Bendungan Sigura-gura No 2 Malang Telp. (0341)551431, 553015  
Email : calvinrobaka53@gmail.com

**ABSTRAC**

*Fulfilling the infrastructure needs of settlements becomes a primary thing for all individuals who are four residential areas, especially in slums. The condition of the slums that are dense and irregular and the lack of provision of infrastructure and environmental advice such as environmental roads, drainage, clean water, sanitation, waste, and fire hazard handling will make the image of a city visible Rundown. Village Kalipang Sutojayan District Blitar which became one of the urban areas that are not detached from the problem of slums. Although based on the national Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019, Indonesia has to be free of the slum as much as zero percent. In addition, in the handling of settlements infrastructure, it takes full and active community involvement to create a healthy environment and a life of the soul. The purpose of money wants to be achieved in this study is to determine the priority handling of urban slum infrastructure that is seen from public willingness to give a form of participation. The methods used are descriptive and weighted. Based on the results of the analysis is known that the infrastructure type of clean water network that is a priority handling 1, and at priority handling 2 there are types of road network infrastructure, drainage, waste, and regularity of buildings. At the level of participation in the infrastructure, there is a road network with the lowest value on the waste network.*

**Keywords:** *Infrastructure, Slums, The Form Of Community Participation*

**ABSTRAK**

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman menjadi hal yang primer sangat bagi semua individu yang menempati suatu kawasan permukiman, terlebih khusus pada permukiman kumuh. Kondisi permukiman kumuh yang padat dan tidak teratur serta minimnya penyediaan prasarana dan sarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, dan penanganan bahaya kebakaran akan menjadikan citra sebuah kota terlihat kumuh. Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar yang menjadi salah satu bagian perkotaan yang tidak terlepas dari masalah permukiman kumuh. Padahal berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia sudah harus bebas kumuh sebanyak nol persen. Selain itu dalam penanganan infrastruktur permukiman dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat secara penuh dan aktif agar tercipta lingkungan yang sehat dan kehidupan yang sejaterah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh perkotaan yang dilihat dari kesediaan masyarakat memberikan bentuk partisipasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan pembobotan. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa jenis infrastruktur jaringan air bersih yang menjadi prioritas penanganan 1, dan pada prioritas penanganan 2 terdapat jenis-jenis infrastruktur jaringan jalan, drainase, persampahan, dan keteraturan bangunan. Sedangkan pada tingkat partisipasi terhadap infrastruktur terdapat pada jaringan jalan dengan nilai dan terendah pada jaringan persampahan.

**Kata Kunci:** Infrastruktur, Permukiman Kumuh, Bentuk Partisipasi Masyarakat

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Kondisi kekumuhan di Kelurahan Kalipang diakibatkan karena padatnya bangunan permukiman yang menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh. Salah satu permukiman terpadat dan kumuh berada di belakang Pasar Lodayo. Pembangunan rumah di kawasan tersebut saling berhimpit, tanpa adanya jarak antar bangunan. Bahkan, terdapat rumah yang tidak mempunyai teras, dan ada pula rumah yang terasnya diperuntukkan sebagai kandang ayam, sehingga menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan kumuh. Selain itu, pembangunan perumahan yang berada di kawasan pertanian juga semakin menggerus lahan pertanian yang ada di Kecamatan Sutojayan. Kawasan pertanian yang seharusnya terbebas dari pembangunan, malah diperuntukkan untuk kawasan perumahan, hal ini terjadi di sepanjang jalan Basuki Rahmat, yang termasuk daerah tepi kota. Pembangunan rumah pada sepanjang jalan Kelud juga tersebar dari ujung barat hingga timur, sehingga rumah-rumah tersebut terlihat tidak teratur jika dilihat berdasarkan garis sempadan bangunannya. Berdasarkan hasil observasi selain masalah pada bangunan permukiman masalah pada penyediaan sarana dan prasarana permukiman juga muncul pada kelurahan ini contohnya: masalah sanitasi, masih terdapat beberapa bangunan rumah yang belum memiliki kloset dan buangan limbah rumah tangga mereka langsung ke sungai yang mengakibatkan sungai menjadi kotor dan bau. Infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, drainase rusak dan pengolahan sampah juga menjadi faktor bertambah kumuh.

Beberapa program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam menata lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Sutojayan, merupakan proyek-proyek fisik dan non-fisik yang kegiatannya meliputi pemasangan paving pada jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, sosialisasi tentang limbah sanitasi, bantuan material

untuk merenovasi beberapa rumah yang tidak layak huni, pelatihan peningkatan ekonomi (ekonomikreatif) masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang infrastruktur permukiman kumuh dan keterlibatan masyarakat perkotaan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh yang dilihat dari segi bentuk partisipasi masyarakat.

### II. Rumusan Masalah

Permasalahan pada lingkungan permukiman kumuh di kelurahan Kalipang adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan peningkatan kualitasnya. Pada hal ini manfaat yang ingin didapatkan dari pembangunan yang berlandaskan partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan social-ekonominya dan mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perbaikan, sehingga kehidupannya dapat terarah. Untuk pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

- Bagaimana kondisi infrastruktur permukiman kumuh yang ada saat ini?
- Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang?
- Bagaimana penanganan infrastruktur permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang

### III. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menentukan prioritas penanganan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang disebutkan di atas, maka sasaran dari penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi kondisi infrastruktur lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang
- Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas

lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang

- c. Menentukan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kalipang

#### IV. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi atas dua bagian yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademis. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

##### A. Manfaat Praktis

Kegunaan akademis menjelaskan bahwa manfaat dari penelitian untuk pihak akademis yang akan dilakukan penelitian lanjutan. Untuk kegunaan akademis adalah sebagai berikut :

- Menambah wawasan peneliti dalam menerapkan ilmu sosial dan budaya masyarakat
- Melatih peneliti untuk menerapkan ilmu budaya dan sosial di masyarakat
- Peneliti dapat menerapkan metode yang sudah ada untuk melakukan penelitian berdasarkan kejadian di lapangan.

##### B. Manfaat Akademis

Secarateoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi dari sisi teoritis maupun non praktis, serta kepada pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, untuk mengetahui cara melakukan penelitian pada lingkungan permukiman kumuh perkotaan.

#### V. TINJAUAN PUSTAKA

##### a. Kampung Kota

Kampung kota adalah suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia dengan ciri-ciri; penduduknya masih membawa sifat dan perilaku kehidupan perdesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang kurang baik dan tidak beraturan, kepadatan bangunan yang tinggi, sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saluran limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya.

##### b. Permukiman Kumuh

permukiman kumuh merupakan permukiman yang memiliki kepadatan bangunan yang tinggi dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, serta tidak dilengkapi dengan prasarana yang memadai, terutama pada jalan dan saluran pembuangan air limbah.

Ciri-ciri permukiman kumuh seperti yang diungkapkan Sinulingga dalam penelitian Nova (2010:72) mengatakan sebagai berikut:

- Penduduknya sangat padat, antara 250-400 jiwa/ha. Ahli perkotaan berpendapat apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha akan timbul masalah, seperti perumahan yang didirikan tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis, dan perlindungan terhadap penularan penyakit.

- Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya kadang-kadang jalan ini tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang telah bersinggungan satu sama lain.
- Fasilitas drainase sangat tidak memadai bahkan terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini akan dengan mudah tergenang air.
- Pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Sebagian penghuni ada yang membuang tinja langsung ke saluran dekat dengan rumahnya atau kesungai terdekat. Sebagian lagi membuat WC cubluk tetapi karena terbatasnya lahan terpaksa harus berdekatan dengan sumur dangkal yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum, sehingga kemungkinan terjadi pencemaran air sumur dangkal ini sangat besar.
- Fasilitas penyediaan air minum sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau air kalengan
- Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang darurat;
- Kawasan ini sangat rawan ketularan penyakit;
- Pemilikan hak terhadap lahan tidak legal, artinya status lahannya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa material.

##### c. Klasifikasi Permukiman Kumuh

Dalam penelitian Wijaya (2016:4) di Kota Malang mengatakan bahwa, berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitas, klasifikasi permukiman kumuh ada dua jenis yaitu:

- o Kategorislum, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman.
- o Kategori squatter settlement, yaitu permukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya disepanjang pinggir rel kereta api, dipinggir kali, dikolong jembatan, dipasar, dikuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitas, kategori permukiman liar (squatter) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau lahan kosong milik Negara.

##### d. Infrastruktur Permukiman

Infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas publik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta merujuk pada system fisik seperti jaringan jalan, air bersih, drainase, telekomunikasi, listrik, limbah, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Dirjen Cipta Karya, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam infrastruktur fisik, antara lain:

- Jalan
- Sistem Drainase
- Jaringan Air Bersih

- Pengelolaan Persampahan
- Pengelolaan Air Limbah

**e. KARAKTERISTIK PENILAIAN PERMUKIMAN KUMUH**

Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan atau permukiman dengan menemukan permasalahan yang ada, seperti permasalahan bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam Permen PUPR NO 02/PRT/M/2016 menyebutkan beberapa poin dalam kriteria penilaian permukiman kumuh yaitu:

- o Bangunan gedung;
- o Jalan lingkungan;
- o Penyediaan air minum
- o Drainase lingkungan
- o Pengelolaan air limbah
- o Pengelolaan persampahan. dan
- o Proteksi kebakaran.

**f. Partisipasi Masyarakat**

Adisasmita (2006) dalam Neogroho (2012;24), keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan (Implementasi) suatu program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal, dimaknai sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan

seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro (1988) bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

Pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam sebuah program pembangunan yang dapat meningkatkan kehidupan dan lingkungan mereka baik dalam pengambilan keputusan, penyusunan program, dan pelaksanaan program tersebut.

**g. Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Menurut Asia Development Bank (ADB) seperti dikutip Soegijoko (2005) dalam Huraerah (2008: 100-101), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut:

- o Berbagi informasi bersama (sosialisasi).
- o Konsultasi/mendapatkan umpan balik
- o Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama
- o Pemberdayaan/kendali

**h. Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Holil (1980) dalam Debora Butar (2012:3) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat meliputi: (1) Buah Pikiran; (2) Tenaga; (3) Sosial; (4) Keahlian; (5) Barang; dan (6) Uang; (7) Pengambilan Keputusan; (8) Partisipasi Representatif.

No	Sasaran	Landasan Teori	Variabel Menurut Teori	Variabel Amatan	Sub Variabel Amatan	
1	Mengidentifikasi kondisi infrastruktur lingkungan permukiman kumuh di kelurahan kalipang	Pengertian Permukiman Kumuh	<i>Sadyohutomo (2009;134)</i> <i>dalam Nova (2010;71)</i>	1. Penghasilan rendah 2. Kepadatan penduduk 3. Kepadatan bangunan 4. Kondisi rumah 5. Jalan 6. Air limbah	1. Bangunan gedung 2. Persampahan 3. Air bersih 4. Air limbah 5. Drainase 6. Jalan 7. Penanggulangan bahaya kebakaran	1. Bangunan gedung: - Ketidakteraturan bangunan - Tingkat kepadatan - Kualitas Bangunan 2. Pengelolaan persampahan - pengangkutan/cara pembuangan 3. Penyediaan air bersih: - sumber air bersih 4. Pengelolaan air limbah: - Jenis MCK/ sanitasi 5. Drainase lingkungan: - Kelancaran mengalir drainase 6. Pelayanan jalan lingkungan: - Kualitas permukaan jalan lingkungan 7. Penanggulangan bahaya kebakaran - Prasarana proteksi kebakaran - Frekuensi kebakaran
		Ciri-ciri permukiman kumuh	<i>Simulingga dalam Nova (2010;72)</i>	1. Kepadatan bangunan 2. Jalan 3. Drainase 4. Pembuangan air kotor/tinja 5. Penyediaan air minum 6. Status lahan		
		Karakteristik permukiman kumuh	<i>Rebekka (1991) dalam Raldi (2001;39)</i>	1. Kepadatan bangunan 2. Jalan		

No	Sasaran	Landasan Teori	Variabel Menurut Teori	Variabel Amatan	Sub Variabel Amatan	
			3. Drainase 4. Sampah			
		<i>Aliyati (2011)</i>	1. Status kepemilikan tanah/rumah 2. Jenis bangunan 3. Umur bangunan 4. Bahan dinding rumah 5. Bahan lantai 6. Bahan atap 7. Jalan 8. Saluran air/selokan Air limbah			
	Infrastruktur permukiman perkotaan	<i>Jhingan (2004) dalam E Sela (2016;46)</i>	1. Transportasi 2. Air bersih 3. Bangunan 4. Jaringan jalan 5. Jaringan drainase 6. Limbah (MCK) 7. Sarana			
No	Sasaran	Landasan Teori	Variabel Menurut Teori	Variabel Amatan	Sub Variabel Amatan	
			persampahan			
2	Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang	➤ <i>Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Faharudin (2011: 39-40)</i> mengatakan bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenis-jenisnya: partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda,	➤ Partisipasi Ide  ➤ Partisipasi tenaga	1. Informasi Pelaksanaan Kegiatan 2. Masyarakat dapat memberikan pendapat/usulan 3. Ikut berperan dalam pengambilan keputusan 4. Ikut berperan dalam evaluasi program	- Partisipasi Ide - Partisipasi tenaga - Partisipasi Harta Benda - Partisipasi kreatifitas	• Keikutsertaan dalam 1. Musyawarah 2. Rapat 3. Sosialisasi 4. Jenjang Pendapat – • Bersedia memberikan tenaga • Bersedia memberikan bantuan materil • Bersedia memberikan kreatifitas
			1. Menghadiri kegiatan penanganan permukiman kumuh 2. Mengawasi pembangunan 3. Mengetahui kerusakan dari pembangunan 4. Masyarakat ikut serta dalam			

No	Sasaran	Landasan Teori	Variabel Menurut Teori	Variabel Amatan	Sub Variabel Amatan
		partisipasi keterampilan dan kemahiran, serta partisipasi sosial.	➤ Partisipasi Harta Benda	➤ pelaksanaan pembangunan	
		➤ Ada dua jenis partisipasi menurut <i>Khotim (2004)</i> , yaitu partisipasi ide dan partisipasi tenaga	➤ Partisipasi kreatifitas	➤ Pemberian bantuan berupa harta maupun benda yang dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh	
		➤ <i>Solekhan (2014: 152-153)</i> , bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya		➤ Masyarakat dapat memberikan bantuan dengan keterampilan dan kemahiran dalam penataan permukiman kumuh	

No	Sasaran	Landasan Teori	Variabel Menurut Teori	Variabel Amatan	Sub Variabel Amatan
		ada 4 (empat) macam, yaitu: partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam menerima pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.			

No	Sasaran	Landasan Teori	Variabel Menurut Teori	Variabel Amatan	Sub Variabel Amatan
3	Menentukan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kalipang	Infrastruktur Permukiman Kumuh.	- Partisipasi Ide - Partisipasi tenaga - Partisipasi Harta Benda - Partisipasi kreatifitas	1. Bangunan gedung 2. Jaringan Persampahan 3. Jaringan Air bersih 4. Jaringan Air limbah 5. Jaringan Drainase 6. Jaringan Jalan 7. Penanggulanga-n bahaya kebakaran	- Musyawarah - Rapat - Sosialisasi - Jenjang Pendapat

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2018.

## i. METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

No	Sasaran	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	
1	Mengidentifikasi kondisi infrastruktur permukiman kumuh	Bangunan Gedung	Keteraturan bangunan dapat dilihat menggunakan interpretasi peta persil bangunan yang mana dilihat dari tata letak bangunan, keselarasan/sejajar, pola, dan ukuran.	
		Keteraturan Bangunan		
		Kepadatan Bangunan		Luas area terbangun suatu wilayah atau jumlah bangunan diatas suatu luasan wilayah yang dinyatakan dengan jumlah bangunan/ha.
		Kualitas Bangunan		Kualitas bangunan dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan yaitu kondisi atap, dinding dan lantai bangunan
		Jalan		Dapat dilihat berdasar kondisi baik, sedang dan buruk serta kondisi perkerasan jalan
		Drainase		Dilihat berdasarkan kemampuan mengalirkan air buang, kondisi kelancaran atau tidak lancar
		Air Bersih		Dapat dilihat berdasarkan sumber air bersih yang dikonsumsi masyarakat.
		Sanitasi dan Limbah		Dilihat dari kondisi limbah dan status kepemilikan sanitasi pada lokasi penelitian
		Persampahan		Dapat dilihat dari cara pembuangan atau pengolahan sampah di lokasi penelitian
		Penanggulangan Bencana		Dilihat berdasarkan ketersediaan prasarana dan frekuensi terjadinya kebakaran padam lokasi penelitian
2	Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat	Partisipasi Ide/Pikiran	Dapat dilihat berdasarkan kerelaan dalam memberikan pikiran/ide dalam penanganan permukiman kumuh. Contohnya, musyawarah, rapat, sosialisasi, dan jenjang pendapat.	
		Partisipasi Tenaga	Dapat dilihat dari kerelaan atau kesediaan masyarakat dalam mendayagunakan seluruh	
		Partisipasi Harta Benda	Dapat dilihat dari kesediaan masyarakat dalam membantu penanganan infrastruktur	

permukiman kumuh dengan memberikan bantuan berupa harta benda atau uang.

Partisipasi Keahlian /kratifitas	Dilihat dari kerelaan atau kesediaan masyarakat dalam hal memberikan bantuan berupa keahlian/kreatifitas untuk kesejahteraan sosial.
----------------------------------	--

Sumber: Kajian Pustaka 2019

## j. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan RTRW Kabupaten Blitar tahun 2008 tentang penentuan Kawasan Perkotaan, Kecamatan Sutujayan termasuk dalam deliniasi wilayah perkotaan di Kabupater Blitar. Kecamatan Sutojayan memiliki luas wilayah sebesar 33,42 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah perkotaan Sutojayan terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Kedungbunder, Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Kalipang, Kelurahan Kembangarum, Kelurahan Jinggaolong dan Kelurahan Jegu

Adapun sebaran kawasan permukiman kumuh yang ditemukan peneliti berdasarkan verifikasi di Kelurahan Kalipang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kelurahan Kalipang**

No	Lingkungan / Dusun	RW	Jumlah RT Tersebar	Luas Kawasan (Ha)
1	Wonorejo	I	RT 1,2,3,4, dan 5	12,08
		II	RT 1,2,3,4, dan 5	17,75
		III	RT 1,2,3,4, dan 5	12,47
2	Bulu	II	RT 2 dan RT 4	8,49
3	Brubuh	II	RT 1 dan RT 3	6,71
<b>Jumlah Total</b>				<b>57,5</b>

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Jumlah total luasan Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang adalah 57,5 Ha dengan luasan terbesar 17,75 Ha yang terdapat pada lingkungan Wonorejo RW 2 dan luasan terkecil sebesar 6,71 Ha yang berada di lingkungan Brubuh RW 2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 4.4. sebaran kawasan permukiman kumuh di kelurahan Kalipang.

### 1. Kondisi Bangunan Gedung

Keteraturan bangunan gedung ada 3 aspek yaitu: a. Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan bisa dilihat berdasarkan tatanan atau pola bangunannya. Suatu bangunan dikatakan teratur apabila pola atau tatanannya sejajar atau terarah mengikuti jaringan jalan. Sedangkan suatu bangunan dikatakan tidak teratur apabila arah hadap bangunan itu tidak sejajar, biasanya ditandai dengan adanya beberapa rumah



yang arah tatanannya kurang jelas dan tak berpola (tidak sejajar) dan biasanya arah hadapnya tidak cenderung menghadap kejalan.

berdasar hasil pengamatan langsung di lokasi dan sesuai kandengan peta bangunan gedung. Berdasarkan tabel 4.5. prosentasi kawasan dengan keteraturan bangunan tertinggi berada pada lingkungan Wonorejo, RW 2 sebesar 30%, sedangkan Kawasan dengan keteraturan terendah terdapat pada lingkungan Brubuh, RW 2 dengan nilai 11%.

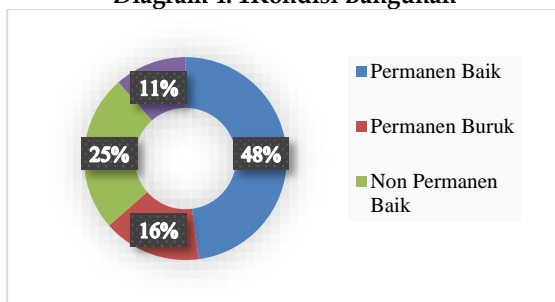
**b. Kepadatan Bangunan**

Kepadatan bangunan ditentukan dengan jumlah unit bangunan terhadap satu nluas (Ha). Berdasarkan hasil perhitungan, lingkungan Wonorejo RW 1 merupakan lingkungan dengan kepadatan bangunan tertinggi yaitu 56 unit/Ha. Sedangkan kepadatan bangunan terendah berada pada lingkungan Brubuh RW 2 yaitu 38 unit/Ha

**c. Kualitas Bangunan**

Kualitas Bangunan rumah dilihat dari bahan struktur bangunan seperti atap, dinding, lantai, dan kondisinya. Dalam penelitian ini disesuaikan dengan kondisi di lokasi penelitian, dimana kualitas bangunan dibedakan menjadi 4 bagian yaitu kondisi bangunan permanen baik, bangunan permanen buruk, bangunan non permanen baik bangunan non permanen buruk. Bangunan yang tergolong dalam bangunan permanen baik adalah bangunan yang memiliki bahan bangunan atap berupa genteng, asbes, atau seng, dinding dari batu bata atau batako dan lantai berbahan keramik, ubin atau semen dan dalam kondisi baik. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan sampel kualitas bangunan yang diambil pada 96 responden, pada umumnya kualitas bangunan rumah tergolong dalam permanen baik dengan jumlah 46unit atau 48%.

**Diagram 4. 1Kondisi Bangunan**

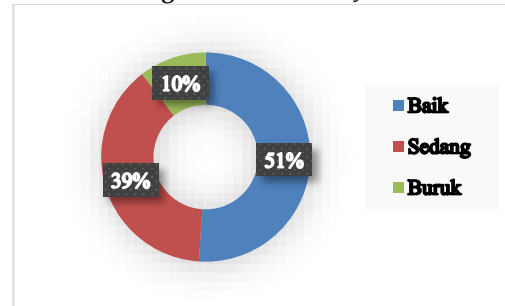


Sumber: Hasil Perhitungan 2019

**2. Jalan**

Pengamatan terhadap jalan dilihat berdasar jalan pada masing-masing rumah (sampel). Mayoritas perkerasan jalan di kelurahan Kalipang adalah aspal dan semen dengan lebar untuk jalan utama 2- 2,5 meter dan jalan lingkungan 1-1,5 meter.

**Diagram 4. 2Kondisi Jalan**



Sumber: Hasil Perhitungan 2019



**Gambar 4. 1KondisiJalan**

Sumber: Survei primer 2019

Keterangan Gambar:

- Kiri : kondisi jalan lingkungan Baik
- Tengah : kondisi Jalan Sedang
- Kanan : kondisi jalan buruk

Berdasarkan diagram 4.2 di sebelah kiri, dari 96 responden 43% diantara menjawab kondisi jalan baik disusul 41% yang berada pada jalan dengan kondisi sedang dan yang terakhir 17% berada pada kondisi jalan buruk.

**3. Drainase**

Kelurahan Kalipang, sebagian besarta telah memiliki drainase yang cukup memadai dengan kondisi baik dan lancar. Mayoritas jenis drainase yang dijumpai di lokasi penelitian adalah drainase jenis terbuka. Kondisi drainase dibagi atas 3 bagian yaitu drainase kondisi baik, drainase kondisi sedang, drainase kondisi buruk. Drainase baik jika tersedia jaringan drainase dengan kondisi mengalir dengan lancar dan tidak mengalami genangan banjir. Drainase kondisi sedang jika,tersedianya jaringan drainase tetapi tidak mengalir lancar karena tersumbat sampah serta mengalami genangan. Drainase buruk adalah keadaan saluran air yang mengalami penyumbatan, tidak mampu mengalirkan air dengan baik, kondisi struktur dari tanah, dan dalam kondisi terbuka serta menimbulkan bau dan pencemaran udara. Dari 96 responden di kelurahan Kalipang, 52% menyatakan drainase kondisi baik, 30% menyatakan drainase kondisi sedang dan18% menyatakan drainase kondisi buruk termasuk didalamnya yang belum tersedia jaringan drainase.



**Gambar 4. 2Kondisi Drainase**  
*Sumber: Survei primer 2019*

#### 4. Air Bersih

Kecamatan Pajarakan merupakan salah satu Berdasarkan hasil survei di kelurahan Kalipang dan pernyataan dari 96 responden bahwa mayoritas masyarakat menggunakan menggunakan sumber air bersih dari sumur galian dan sumur bor. Hal ini terjadi akibat belum tersediannya prasana PDAM. Dalam penilaian kondisi air bersih di kelurahan kalipang dibagi atas 3 bagian yaitu kondisi baik, jika sumber air konsumsi adalah PAM, sumber air untuk mandi berasal dari PAM, dengan kondisi air tidak berbau, warna air putih bersih/jernih. Kondisi sedang, jika sumber air konsumsi adalah sumur, sumber air untuk mandi berasal dari sumur, dengan kondisi air bersih tidak berbau, warna air putih bersih/jernih. Kondisi buruk, jika sumber air konsumsi adalah sungai, sumber air untuk mandi berasal dari sungai, dengan kondisi air berbau, warna air kecoklatan/keruh.

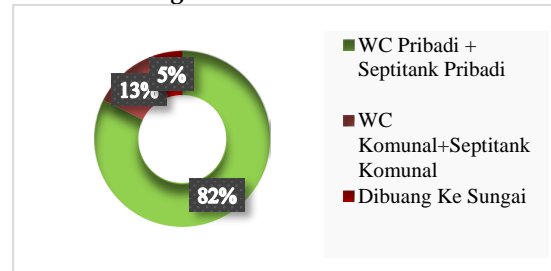


**Gambar 4. 3 Sumber Air Bersih**  
*Sumber: Survei Primer 2019*

#### 5. Sanitasi

Sanitasi dinilai berdasar 3 kondisi yaitu, kondisi baik, kondisi sedang dan kondisi buruk. Kondisi baik jika memiliki sanitasi ditiap rumah, kondisi sedang, jika sanitasi individu maupun komunal jumlahnya kurang dari pada penghuni dan dilakukan di MCK umum/bersama, dan kondisi buruk, jika tidak memiliki sanitasi individu maupun komunal dan kegiatan MCK dilakukan di sungai/tidak ada septitank. Berdasarkan hasil tanggapan dari 96 responden 79 jiwa atau 82% tergolong dalam kondisi sanitasi baik, 12 jiwa atau 23% termasuk dalam kondisi sanitasi sedang, dan 5 jiwa atau 5% tergolong dalam kondisi sanitasi buruk.

**Diagram 4. 3Kondisi Sanitasi**



*Sumber: Hasil Perhitungan 2019*

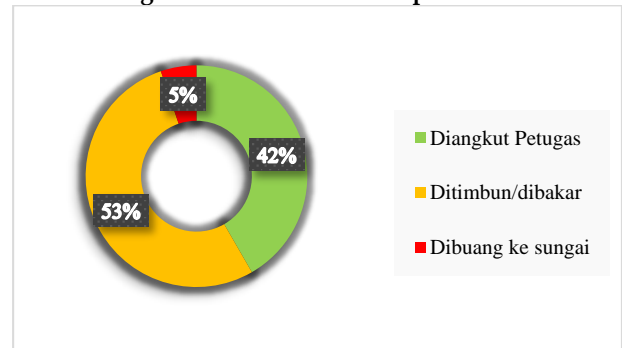


**Gambar 4. 4 Kondisi Sanitasi**  
*Sumber: Survei Primer 2019*

#### 6. Persampahan

Penilaian persampahan dibagi atas 3 bagian yaitu baik, sedang dan buruk. Dikatakan baik, jika cara pembuangan sampah diangkut petugas/dibuangke TPS/TPA. Nilai sedang, jika cara pembuangan sampah dilakukan dengan cara dikumpul/ditumpuk kemudian dibakar. Nilai buruk, jika cara pembuangan sampah dibuang kesungai atau keselokan. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi fisik dilapangan mayoritas masyarakat di RW (kumuh) kelurahan Kaipang belum memiliki bak sampah sementara, selain itu juga manajemen pengangkutan sampah belum maksimal, intensitas pengangkutan sampah dilakukan 1 kali dalam 2 hari. Terdapat 1 TPS di lingkungan Brubuh RW 2. Berdasarkan hasil kuisioner kepada 96 responden 40 atau 42% jiwa tergolong dalam pengolahan sampah baik, 51 atau 53% jiwa tergolong dalam pengolahan sampah sedang, dan 5 atau 5% jiwa tergolong dalam pengolahan sampah buruk.

**Diagram 4. 4Kondisi Persampahan**



*Sumber: Hasil Perhitungan 2019*



**Gambar 4. 5 Kondisi Persampahan**  
 Sumber: Hasil Survei Primer 2019

## k. ANALISA

### I. Analisa Nilai Kondisi Infrastruktur Permukiman Kumuh

Analisa nilai kondisi infrastruktur ini akan dijabarkan per RW yang akan ditabelkan berdasarkan variable penelitian yakni; bangunan gedung (keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan), jalan (perkerasan jalan), drainase (kelancaran drainase), air bersih (pelayanan air bersih), sanitasi (jenis sanitasi), persampahan (pelayanan pengangkutan sampah), dan penanggulangan bahaya kebakaran (frekuensi kebakaran).

Berdasarkan hasil perhitungan bobot kondisi infrastruktur permukiman kumuh pada semua RW kawasan kumuh di kelurahan Kalipang diketahui bahwa jenis infrastruktur yang terindikasi “buruk” untuk semua RW adalah Jaringan air bersih. Sementara untuk jenis infrastruktur yang terindikasi “buruk” lainnya adalah pada RW I dan III

### III. Analisa Prioritas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Analisa prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh ini akan dijabarkan dalam 2 bentuk, yaitu penentuan nilai prioritas penanganan infrastruktur dan scenario atau bentuk penanganan infrastruktur permukiman kumuh dengan mengkaitkan bentuk partisipasi dalam penanganan pada RW kawasan kumuh di Kelurahan Kalipang.

**Tabel 5. 1 Prioritas Penanganan Pada Jenis Infrastruktur di Kelurahan Kalipang**

Lokasi	Prioritas Penanganan
--------	----------------------

lingkungan Wonorejo, RW II lingkungan Bulu, dan RW II lingkungan Brubuh dengan jenis infrastruktur bangunan gedung variable keteraturan bangunan. Jenis infrastruktur lainnya yang terindikasi “buruk” adalah jaringan jalan pada RW II lingkungan Bulu dan RW II lingkungan Brubuh serta jaringan drainase pada RW II lingkungan Brubuh.

### II. Analisa Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Infrastruktur Permukiman Kumuh

Analisa bentuk partisipasi masyarakat ini akan dijabarkan per RW Kawasan kumuh kelurahan Kalipang, yang dilakukan dengan melihat frekuensi bentuk partisipasi tertinggi dan terendah terhadap infrastruktur permukiman di setiap kawasan kumuh. Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan, terdapat 9 bentuk partisipasi (dari 4 bentuk partisipasi pada variable penelitian) yang ditemukan. Untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur permukiman peneliti melakukan proses akumulasi, yang dimana dengan melakukan pemberian skor terhadap 9 bentuk partisipasi tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian skor terhadap infrastruktur permukiman kumuh yaitu dengan cara mengkalikan skor bentuk bentuk partisipasi dengan jumlah partisipan pada salah satu jenis infrastruktur.

Contoh: diketahui jumlah partisipan pada bentuk partisipasi ide/pikiran terhadap infrastruktur bangunan gedung adalah sebanyak 5 jiwa. Skor pada bentuk partisipasi ide/pikiran adalah 1, dan jumlah partisipan terhadap bangunan gedung adalah 5. Jadi  $1 \times 5 = 5$ . Jadi skor untuk infrastruktur bangunan gedung adalah 5. Pemberian skor pada bentuk partisipasi dan infrastruktur niberjuan agar menetahui ini lagi dari (kesedian) bentuk partisipasi masyarakat pada semua RW kawasan kumuh kelurahan kalipang

	Air bersih
RW I Lingkungan Wonorejo	Keteraturan Bangunan (bangunan Gedung) Persampahan
RW II Lingkungan Wonorejo	Air Bersih
RW II Lingkungan Wonorejo	Air Bersih
RW II Lingkungan Bulu	Air Bersih
RW II Lingkungan Brubuh	Air Bersih

Sumber: Hasil Analisa 2019

**Tabel 5. 2 Prioritas dan Upaya Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalipang**

Lokasi	Hasil Analisa Sasaran 1	Hasil Analisa Prioritas Sasaran 3	Kesimpulan	Upaya Penanganan
<b>RW I Lingkungan Wonorejo</b>	Bangunan Gedung (Keteraturan	Bangunan Gedung (Keteraturan Bangunan),	Berdasarkan hasil analisa sasaran 1 diketahui bahwa variabel infrastruktur yang terkategori “buruk” atau nilai rendah adalah <b>Bangunan Gedung</b>	• Jaringan Air Bersih; upaya penanganan yang dilakukan adalah instalasi jaringan pipa PDAM. Hal ini sangat dibutuhkan karena menyangkut pemenuhan

Lokasi	Hasil Analisa Sasaran 1	Hasil Analisa Prioritas Sasaran 3	Kesimpulan	Upaya Penanganan
	Bangunan) dan Jaringan Air Bersih	Jaringan Air Bersih dan Jaringan Persampahan	(keteraturan bangunan), dan <b>jaringan air bersih</b> . Sedangkan pada analisa prioritas penanganan diketahui variabel yang memiliki nilai rendah adalah <b>Bangunan Gedung (keteraturan bangunan), jaringan air bersih, dan jaringan persampahan</b> . Prioritas penanganan pada RW ini adalah jaringan air bersih, jaringan persampahan dan bangunan gedung pada variable keteraturan bangunan. Air bersih menjadi prioritas utama, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat belum menggunakan air bersih yang bersumber pada PDAM. Untuk kualitas air bersih yang saat ini digunakan dinilai cukup untuk konsumsi sebatas MCK tidak untuk konsumsi minum.	primer bagi setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sehat dan sejahterah. Masyarakat dapat secara penuh dilibatkan dalam penanganan infrastruktur air bersih baik dari bentuk partisipasi ide/pikiran, tenaga, harta benda (materil), dan kreativitas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Persampahan; upaya yang dapat dilakukan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan bak sampah sementara, minimal 1 rumah 1 buah bak sampah</li> <li>Optimalisasi system pengangkutan sampah baik dari penambahan petugas pengangkut sampah sampai revisi jadwal pengangkutan. Hal ini, disesuaikan dengan volume sampah perhari.</li> <li>Optimalisasi jalur pengangkutan sampah, hal ini diperlukan karena berdasarkan hasil survey ditemukan bahwa tidak semua jalan lingkungan di lalui oleh petugas sampah.</li> </ol> </li> <li>Bangunan Gedung (keteraturan bangunan) dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pembangunan perumahan yang harus mengikuti persyaratan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah merenovasi atau merehabilitasi bangunan yang tidak sesuai denganarah (keselarasan) dan pola dengan bangunan di sekitarnya.</li> </ul>
<b>RW II Lingkungan Wonorejo</b>	Jaringan Air Bersih	Jaringan Air Bersih	Berdasarkan hasil analisa sasaran 1 diketahui bahwa jenis infrastruktur yang terindikasi “buruk” atau mendapat nilai terendah adalah jaringan Air Bersih, sedangkan hasil analisa sasaran 3 diketahui bahwa jaringan Air Bersih yang menjadi prioritas penanganan. Hal ini dikarenakan belum tersedianya jaringan PDAM di Kelurahan kalipang.	Jaringan Air Bersih; upaya penanganan yang dilakukan adalah instalasi jaringan pipa PDAM. Hal ini sangat dibutuhkan karena menyangkut pemenuhan primer bagi setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sehat dan sejahterah. Masyarakat dapat secara penuh dilibatkan dalam penanganan infrastruktur air bersih baik dari bentuk partisipasi ide/pikiran, tenaga, harta benda (materil), dan kreativitas.
<b>RW III Lingkungan Wonorejo</b>	Bangunan Gedung (Keteraturan Bangunan) dan Jaringan Air Bersih	Jaringan Air Bersih	Berdasarkan hasil analisa sasaran 1 diketahui bahwa jenis infrastruktur yang terindikasi “buruk” atau mendapat nilai terendah adalah bangunan gedung dan jaringan Air Bersih, sedangkan hasil analisa sasaran 3 diketahui bahwa jaringan Air Bersih yang menjadi prioritas penanganan. Hal ini dikarenakan keteraturan bangunan di pada RW ini tergolong rendah dan untuk penyediaan air bersih belum tersedianya jaringan PDAM di Kelurahan kalipang.	Upaya penanganan prioritas utama adalah <b>jaringan Air Bersih</b> sedangkan bangunan gedung akan menjadi penanganan prioritas ke 2 setelah air bersih berhasil ditangani. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Air Bersih; upaya penanganan yang dilakukan adalah instalasi jaringan pipa PDAM. Hal ini sangat dibutuhkan karena menyangkut pemenuhan primer bagi setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sehat dan sejahterah. Masyarakat dapat secara penuh dilibatkan dalam penanganan infrastruktur air bersih baik dari bentuk partisipasi ide/pikiran, tenaga, harta benda (materil), dan kreativitas.</li> <li>Bangunan Gedung (keteraturan bangunan) dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pembangunan perumahan yang harus mengikuti persyaratan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah merenovasi atau merehabilitasi bangunan yang tidak sesuai dengan arah (keselarasan) dan pola dengan bangunan di sekitarnya.</li> </ul>
<b>RW II Lingkungan Bulu</b>	Bangunan Gedung (Keteraturan Bangunan), jaringan jalan dan Jaringan Air Bersih	Jaringan Air Bersih	Berdasarkan hasil analisa sasaran 1 diketahui bahwa infrastruktur yang terindikasi “buruk” atau mendapat nilai rendah adalah bangunan gedung (keteraturan bangunan), jaringan jalan, dan Air bersih. Sedangkan pada hasil analisa prioritas penanganan adalah jenis infrastruktur air bersih. Hal ini terjadi karena alasan yang sama yaitu karena belum tersedianya jaringan pipa PDAM. Pada jaringan jalan terindikasi “buruk” dikarenakan pada rw ini masih terdapat beberapa jalan lingkungan yang belum memiliki perskerasan seperti aspal, semen, atau paving.	Upaya penanganan prioritas utama adalah <b>jaringan Air Bersih</b> sedang bangunan gedung dan jaringan jalan akan menjadi penanganan prioritas ke 2 setelah air bersih berhasil ditangani. <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Air Bersih; upaya penanganan yang dilakukan adalah instalasi jaringan pipa PDAM. Hal ini sangat dibutuhkan karena menyangkut pemenuhan primer bagi setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sehat dan sejahterah. Masyarakat dapat secara penuh dilibatkan dalam penanganan infrastruktur air bersih baik dari bentuk partisipasi ide/pikiran, tenaga, harta benda (materil), dan kreativitas.</li> <li>Bangunan Gedung (keteraturan bangunan) dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pembangunan perumahan yang harus mengikuti persyaratan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah merenovasi atau merehabilitasi</li> </ul>

Lokasi	Hasil Analisa Sasaran 1	Hasil Analisa Prioritas Sasaran 3	Kesimpulan	Upaya Penanganan
				<p>bangunan yang tidak sesuai dengan arah (keselarasan) dan pola dengan bangunan di sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan jalan dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan lingkungan yang permukaannya mengalami kerusakan, pemberian perkerasan pada jalan lingkungan yang permukaannya masih tanah, dan peningkatan kualitas jalan, contohnya mengupgrade permukaan jalan dari semen ke aspal. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi program terkait.</li> </ul>
<b>RW II Lingkungan Brubuh</b>	Bangunan Gedung (keteraturan bangunan), Jaringan Jalan, Jaringan Drainase, dan Jaringan Air Bersih.	Jaringan Air Bersih	<p>Berdasarkan hasil analisa sasaran 1 diketahui bahwa infrastruktur yang terindikasi "buruk" atau mendapat nilai rendah pada hasil perhitungan bobot yakni bangunan gedung (keteraturan bangunan), jaringan jalan, jaringan drainase, dan jaringan air bersih. Sedangkan berdasarkan hasil analisa sasaran 3 diketahui bahwa jenis infrastruktur yang menjadi prioritas adalah jaringan air bersih. Permasalahan pada bangunan gedung yakni keteraturan bangunan yang dimana sebagian besar bangunan didirikan dengan tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam hal ini mengacu pada UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, kemudian pada masalah jaringan jalan disebabkan karena pada beberapa titik jaringan jalan belum memiliki perkerasan seperti aspal, semen, dan paving. Jaringan drainase pada RW ini pelayanannya belum sepenuhnya optimal, berdasarkan hasil survey terdapat beberapa bagian jalan yang belum mendapat drainase. Untuk masalah jaringan air bersih dikarenakan belum tersedianya jaringan pipa PDAM.</p>	<p>Upaya penanganan prioritas utama adalah <b>jaringan Air Bersih</b> sedang bangunan gedung dan jaringan jalan dan jaringan drainase akan menjadi penanganan prioritas ke 2 setelah air bersih berhasil ditangani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Air Bersih; upaya penanganan yang dilakukan adalah instalasi jaringan pipa PDAM. Hal ini sangat dibutuhkan karena menyangkut pemenuhan primer bagi setiap anggota masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sehat dan sejahtera. Masyarakat dapat secara penuh dilibatkan dalam penanganan infrastruktur air bersih baik dari bentuk partisipasi ide/pikiran, tenaga, harta benda (materil), dan kreativitas.</li> <li>Bangunan Gedung (keteraturan bangunan) dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang pembangunan perumahan yang harus mengikuti persyaratan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah merenovasi atau merehabilitasi bangunan yang tidak sesuai dengan arah (keselarasan) dan pola dengan bangunan di sekitarnya.</li> <li>Jaringan jalan dapat dilakukan dengan memperbaiki jalan lingkungan yang permukaannya mengalami kerusakan, pemberian perkerasan pada jalan lingkungan yang permukaannya masih tanah, dan peningkatan kualitas jalan, contohnya mengupgrade permukaan jalan dari semen ke aspal. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi program terkait.</li> <li>Jaringan drainase dapat dilakukan upaya penanganan seperti pembersihan drainase yang tersumbat akibat kotoran atau sampah. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan merenovasi struktur bangunan drainase yang menagami kerusakan dan juga penyediaan jaringan drainase pada bagian jalan yang belum memiliki drainase.</li> </ul> <p>Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan infrastruktur permukiman kumuh, yang dapat dilakukan dengan sosialisasi mendalam dan pemberitahuan informasi baik dari pemerintah daerah/kelurahan maupun pemangku kepentingan lingkup RW/RT ataupun tokoh masyarakat/tokoh adat.</p>

Sumber: Hasil Analisa 2019

## I. PENUTUP

### Kesimpulan

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilakukan sesuai sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti serta memuat ulasan terkait dengan tema studi berikutnya yang masih berkaitan dengan infrastruktur permukiman kumuh dan bentuk partisipasi masyarakat.

Uraian berikut ini akan membahas 3 poin kesimpulan yaitu terkait kondisi infrastruktur permukiman kumuh, bentuk partisipasi masyarakat yang dilihat dari kesediaan dalam ikut berpartisipasi

dan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh pada lokasi penelitian.

#### A. Kondisi Infrastruktur Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalipang

Penjabaran hasil diidentifikasi kondisi infrastruktur ini akan diurutkan berdasarkan RW kawasan kumuh.

##### a. RW I Lingkungan Wonorejo

Berdasarkan hasil identifikasi dan hasil analisa yang telah dilakukan dari 7 jenis infrastruktur yang menjadi variabel penelitian diketahui pada jenis infrastruktur bangunan gedung sub variabel keteraturan bangunan dan jenis infrastruktur jaringan air bersih terindikasi "buruk" atau

mendapat nilai rendah pada hasil perhitungan nilai bobot yakni sebesar 0,25.

b. RW II Lingkungan Wonorejo

Berdasarkan hasil identifikasi dan hasil analisa yang telah dilakukan dari 7 jenis infrastruktur yang menjadi variabel penelitian diketahui pada jenis infrastruktur jaringan air bersih yang terindikasi buruk dengan hasil perhitungan nilai bobot sebesar 0,25.

c. RW III Lingkungan Wonorejo

Hasil identifikasi lapangan dan hasil analisa dari 7 jenis infrastruktur yang menjadi variabel penelitian diketahui pada jenis infrastruktur bangunan gedung sub variabel keteraturan bangunan dan jenis infrastruktur air bersih yang tergolong dalam kondisi "buruk" dan hasil perhitungan nilai bobot terendah yakni sebesar 0,25

d. RW II Lingkungan Bulu

Berdasarkan hasil identifikasi dan hasil analisa yang telah dilakukan dari 7 jenis infrastruktur yang menjadi variabel penelitian diketahui pada jenis infrastruktur bangunan gedung sub variabel keteraturan bangunan jaringan jalan, dan jaringan air bersih yang terindikasi "buruk" atau mendapat nilai terendah dari hasil perhitungan bobot yakni sebesar 0,25 untuk keraturan bangunan dan jaringan air bersih dan 0,45 untuk jaringan jalan

e. RW II Lingkungan Brubuh

Berdasarkan hasil identifikasi dan hasil analisa yang telah dilakukan dari 7 jenis infrastruktur yang menjadi variabel penelitian diketahui pada jenis infrastruktur bangunan gedung sub variabel keteraturan bangunan jaringan jalan, jaringan drainase, dan jaringan air bersih yang terindikasi "buruk" atau mendapat nilai terendah dari hasil perhitungan bobot yakni sebesar 0,25 untuk keraturan bangunan dan jaringan air bersih dan 0,45 untuk jaringan jalan dan jaringan drainase.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Terhadap Infrastruktur Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalipang

Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan terhadap 96 responden, diketahui terdapat 9 bentuk partisipasi dari 4 variabel utama bentuk partisipasi. Kemudian setelah dilakukan perhitungan ditemukan tingkat partisipasi tertinggi yang diukur dari kesediaan responden memberikan bentuk partisipasi terdapat jenis infrastruktur jalan dengan nilai sebesar 57, sedangkan terendah terdapat pada jenis infrastruktur jaringan persampahan dengan hasil penilaian sebesar 47.

C. Prioritas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan ditemukan ada 2 jenis prioritas penanganan yang dapat dilakukan pada semua RW kawasan kumuh di kelurahan Kalipang. Adapun jenis prioritas penanganan yang dimaksud adalah:

a. Prioritas penanganan 1: adalah prioritas penanganan pada jenis infrastruktur yang berdasarkan hasil analisa sasaran 3 yaitu jaringan air bersih pada semua RW kawasan

kumuh, bangunan gedung (keteraturan bangunan) dan jaringan persampahan pada RW I lingkungan Wonorejo.

b. Prioritas penanganan 2: adalah prioritas penanganan pada jenis infrastruktur yang berdasarkan hasil analisa sasaran 1 yaitu pada jenis infrastruktur yang hasil perhitungan bobot mendapat nilai rendah. Jenis infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut:

- RW III lingkungan Wonorejo: bangunan gedung (keteraturan bangunan)
- RW II lingkungan Bulu: bangunan gedung (keteraturan bangunan) dan jaringan jalan.
- RW II lingkungan Brubuh: bangunan gedung (keteraturan bangunan), jaringan jalan dan jaringan drainase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eko Budiharjo, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung : Alumni, 1992
- Wijaya, D. W. (2016). *Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas Untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang*.JIAP FIA UB Vol. 2 No. 1.
- Kurniasih S. 2007. *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di Pertukangan Utara Jakarta Selatan*. Jurnal. Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur
- Zulkifli, A. (2014). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Jakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-602-262-436-3.
- Sulaiman. 2005. *Proses Partisipasi dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat*. Tesis
- Aliyati Ratu. 2011. *Permukiman Kumuh Di Bantaran Ci-Liwung (Studi Kasus Kelurahan Manggarai-Srengseng Sawah dan Kelurahan Kampung Melayu-Kalisari*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Adisasmita, R. (2008). *Pembangunan Kota Optimum, Efisien, Dan Mandiri*. Makassar.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Presentase Penduduk Daerah Perkotaan Menurut Provinsi*. Diakses pada 19 Juli 2018, 9:20 AM
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. 2015. *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh*. Volume 1. Diakses Pada 12 Februari 2018, 08:12 PM.
- Nursyahbani, R. (2015). *Kajian Karakteristik Permukiman Kumuh di Kampung Kota*. Jurnal Teknik PWK. Vol. 1. No. 2.
- Heryati. (2008) *Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Gorontalo*. Jurnal UNG
- Sela, R.L.E. (2016). *Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan Dengan Pendekatan Compact City Strategi Koridor Lintas Tengah Kabupaten Lampung Tengah*. Tumu Ilmiah IPLBI.
- Kasjono, H. S. (2011). *Penyehatan Permukiman*. Yogyakarta: Goyen Publishing. ISBN 978-602-9018-11.

- Pamekas, R. (2013). *Pembangunan Dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman*. Jakarta: Pustaka Jaya. ISBN 978-797-419-410-2.
- Ramadona, A. L. (2011). *Membangun Kembali Kota Secara Berkelanjutan Mempersiapkan Masa Depan Dengan Baik*. Yogyakarta: BPFE. ISBN 979-979-979-979-979.
- Sadana, A. S. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Jakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-602-262-241-3.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. ISBN 979-8433-64.
- Yunus, H. S. (2009). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pongung: Pustaka Pelajar. ISBN 978-602-8764-73.
- Safrin, I. (2014). *Skala Prioritas Dan Kebutuhan Infrastruktur di Desa Gresik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang*.
- Nurzazah, R. (2015). *Strategi Penentuan Prioritas Kawasan Permukiman Ciloseh Kota Tasikmalaya Berdasarkan Kriteria Kekumuhan*. Prosiding, ISSN 2460-6480.
- Devianti, D. (2013). *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemnbangunan di Karang Jati Kecamatan Balik Papan Tengah*. EJOURNAL Vol. 1. NO. 2.
- Fahrudin, A. (2006). *Pemberdayaan, Partisipasi, & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Noegroho, N. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan: Study Kasus Kegiatan PLPBK-BK Di Kota Medan Dan Kota Payakumbuh*. Jurnal ComTech Vol. 3 No. 1.
- Butar, Debora C. B. (2012) *Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Teknik POMITS Vol. 1. No. 1.
- Safrin, I. (2014). *Skala Prioritas Dan Kebutuhan Infrastruktur di Desa Gresik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang*.
- Wibowo, H. (2009). *Penggunaan Metode Irap Dalam Penentuan Prioritas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Kasus Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya )*. Jurnal Rekayasa Vol. 13 No.3
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- Sujarweni, V. Winatra (2014). *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.